

Sebuah literature review terhadap penelitian penghindaran pajak di jurnal terindeks Sinta

Muhammad Dzikri Hadiyarroyan
Dekar Urumsah

Universitas Islam Indonesia
e-mail: muhammad.hadiyarroyan@students.uii.ac.id

Abstrak

Peneliti menyadari sangat penting untuk merenungkan dan mengembangkan penelitian mengenai penghindaran pajak karena sangat minimnya penelitian yang dilakukan berkaitan dengan topik tersebut di Indonesia. Peneliti mereview 17 jurnal yang berkaitan dengan ekonomi, akuntansi, manajemen, dan keuangan yang terindeks di Sinta. Sehingga didapat 13 artikel yang membahas penghindaran pajak. Peneliti menyadari sangat penting untuk merenungkan dan mengembangkan penelitian mengenai penghindaran pajak karena sangat minimnya penelitian yang dilakukan berkaitan dengan topik tersebut di Indonesia. Peneliti bertujuan untuk menguji hubungan antara koneksi politik, foreign investor's interest, related party transactions, dan penghindaran pajak. Kemudian peneliti juga akan menguji pengaruh moderasi corporate governance pada hubungan antara koneksi politik dan foreign investor's interest terhadap penghindaran pajak melalui related party transactions.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Agresivitas Pajak, Penggelapan Pajak

DOI: [10.20885/ncaf.vol1.art7](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art7)

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Namun yang menjadi sumber pendapatan negara yang paling utama berasal dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan informasi APBN tahun 2018, total anggaran pendapatan negara tahun 2018 ialah sebesar Rp 1.894,7 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 275,4 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,2 triliun. Artinya pendapatan yang bersumber dari pajak menyumbangkan sekitar 85,4% dari porsi pendapatan negara secara keseluruhan.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan memengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat (Carolina, Natalia, & Debbianita, 2014). Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus menaikkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan hampir sebagian besar wajib pajak tidak ada secara sukarela dengan senang hati untuk membayar pajak dan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan (Dharma & Ardiana, 2016). Wajib pajak dalam hal ini perusahaan akan berupaya memperkecil jumlah pembayaran pajak dengan cara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal ini dimungkinkan apabila ada peluang untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan (Suyanto & Supramono, 2012). *Tax aggressiveness* merupakan

suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak (Pranoto & Widagdo, 2015).

Salah satu fenomena tax aggressiveness yang terjadi di dunia internasional belum lama ini yaitu kasus mengenai Panama *papers*. *The Panama papers* merupakan dokumen finansial yang berisikan 11,5 juta data dokumen rahasia yang dibuat oleh sebuah firma hukum Mossack Fonseca dari negara Panama. Dokumen tersebut memuat daftar klien yang menggunakan jasa perusahaan dalam hal pembentukan perusahaan baru, dan pengelolaan asset di luar negeri. Munculnya dokumen Panama *papers* ini juga membuktikan bahwa masih tingginya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan sejumlah wajib pajak di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain itu, dokumen Panama *papers* cukup menarik perhatian publik karena dokumen ini berisikan nama sejumlah perusahaan, konglomerat, dan pejabat tinggi dari berbagai negara yang diduga melakukan penghindaran pajak, termasuk ada beberapa yang berasal dari Indonesia. Berdasarkan dari beberapa kasus penghindaran pajak yang terjadi belakangan ini patut dijadikan perhatian lebih oleh pemangku kebijakan perpajakan di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP diharapkan dapat menelusuri potensi-potensi kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri yang berasal dari usaha mereka di dalam maupun luar negeri.

Peneliti menyadari sangat penting untuk merenungkan dan mengembangkan penelitian mengenai penghindaran pajak karena sangat minimnya penelitian yang dilakukan berkaitan dengan topik tersebut di Indonesia. Untuk itu setelah melakukan literature review ini diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan dan mengisi kekosongan penelitian serta menawarkan saran untuk arah penelitian di masa depan. Selain meringkas dan menjabarkan hasil penelitian terdahulu peneliti juga menganalisis area yang berpotensi besar untuk memperluas kontribusi jurnal penelitian dan membuat penelitian yang bertopik penghindaran pajak di Indonesia semakin berkembang.

TINJAUAN LITERATURE

Peneliti mengawali proses identifikasi penelitian yang berkaitan dengan tax avoidance dengan cara memilih jurnal-jurnal yang terindeks di Sinta. *Science and Technology Index* (SINTA) merupakan sebuah portal nasional yang berisi tentang pengukuran kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mencakup beberapa artikel dan penelitian di Indonesia. Mengacu pada seluruh hasil penelitian yang terdapat di SINTA, peneliti membuat *literature review* yang bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan penelitian yang dilakukan di Indonesia berkaitan dengan penghindaran pajak. Selain itu peneliti tertarik untuk mengidentifikasi bagaimana penelitian tax avoidance atau penghindaran pajak yang diterbitkan dalam SINTA dapat memberikan pemahaman dan hasil penelitian berkaitan dengan fenomena tersebut.

Peneliti membatasi review ini dengan hanya melakukan review atas jurnal-jurnal yang berkaitan dengan bidang ekonomi, akuntansi, manajemen, dan keuangan yang masuk dalam peringkat 1 sampai dengan 150 di Sinta. Pemeringkatan yang dilakukan oleh Sinta berdasarkan jumlah sitasi dan h-indeks dari Google Scholar yang telah dibuat oleh masing-masing jurnal setelah dilakukan verifikasi. Tabel 1 menunjukkan jurnal-jurnal yang termasuk dalam kriteria literature review ini.

Setelah mendapatkan 17 jurnal yang berkaitan dengan ekonomi, akuntansi, manajemen, dan keuangan tersebut, peneliti kemudian melakukan pencarian dengan menuliskan kata kunci “pajak”, “tax”, “tax avoidance”, “penghindaran pajak”, “agresivitas pajak”, “tax aggressiveness”, “tax evasion” dan “penggelapan pajak” di masing-masing jurnal tersebut yang telah otomatis mencari di database jurnal yang tersedia secara online. Sehingga didapati beberapa penelitian sebagaimana terlihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Daftar Jurnal Sesuai Kriteria Review

No.	Rank.	Nama Jurnal	Tersedia Online
1	S1	<i>Gadjah Mada International Journal of Business</i> (Universitas Gadjah Mada)	Vol. 1, No. 2 (1999) - Vol 21, No 1 (2019)
2	S2	Jurnal Manajemen dan Keuangan (Universitas Kristen Petra)	Vol. 1, No. 1 (1999) - Vol. 21, No. 1 (2019)
3	S2	Jurnal Akuntansi dan Keuangan (Universitas Kristen Petra)	Vol. 1, No. 1 (1999) - Vol. 20, No. 2 (2018)
4	S2	Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (Universitas Islam Indonesia)	Vol. 1, No. 1 (1997) - Vol. 22, No. 2 (2018)
5	S2	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (Universitas Indonesia)	Vol. 1, No. 1 (2004) - Vol. 15, No 1 (2018)
6	S2	Jurnal Dinamika Manajemen (Universitas Negeri Semarang)	Vol. 1, No. 1 (2010) - Vol. 9 No. 2 (2018)
7	S2	<i>Journal of Indonesian Economy and Business</i> (Universitas Gadjah Mada)	Vol. 1, No. 1 (1986) - Vol. 33, No. 3 (2018)
8	S2	Jurnal Keuangan dan Perbankan (Universitas Merdeka Malang)	Vol. 12, No. 1 (2008) - Vol. 23, No. 1 (2019)
9	S2	Jurnal Aplikasi Manajemen (Universitas Brawijaya)	Vol 7, No. 1 (2009) - Vol. 17, No. 1 (2019)
10	S2	Jurnal Siasat Bisnis (Universitas Islam Indonesia)	Vol. 1, No. 6 (2001) - Vol. 22, No. 2 (2018)
11	S2	Jurnal Dinamika Akuntansi (Universitas Negeri Semarang)	Vol. 1, No. 1 (2009) - Vol. 10, No. 2 (2018)
12	S2	Jurnal Akuntansi Multiparadigma (Universitas Brawijaya)	Vol. 1, No. 1 (2010) - Vol. 10, No. 1 (2019)
13	S2	<i>Economic Journal of Emerging Markets</i> (Universitas Islam Indonesia)	Vol. 1 (1993) - Vol. 11, No. 1 (2019)
14	S2	<i>Economics Development Analysis Journal</i> (Universitas Negeri Semarang)	Vol. 1, No. 1 (2012) - Vol. 8, No. 1 (2019)
15	S2	<i>Journal of Economics, Business, & Accountancy</i> (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya)	Vol. 13, No. 1 (2010) - Vol. 21, No. 3 (2019)
16	S2	Jurnal Akuntansi dan Investasi (Universitas Muhamaddiyah Yogyakarta)	Vol. 1, No. 1 (2000) - Vol. 20, No. 2 (2019)
17	S2	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis (Universitas Udayana)	Vol. 1, No. 1 (2006) –Vol. 14, No. 1 (2019)

Tabel 2. Penelitian Terkait Tax Avoidance

No	Peneliti	Judul	Variabel	Populasi & Sampel	Hasil
1	(Rahayu, 2010)	Evaluasi Regulasi atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing	V. Independen: Evaluasi regulasi (TP, CFC, TH, TC) V. Dependen: Penghindaran pajak	Studi kepustakaan dan pengamatan terlibat KPP dan konsultansi pajak yang menangani WP PMA, perusahaan PMA, dan Badan Peradilan Pajak	Praktik penghindaran pajak yang sangat umum dilakukan melalui skema transfer pricing dan thin capitalization.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Populasi & Sampel	Hasil	
2	(Suyanto & Supramono, 2012)	Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	V. Independen: Likuiditas, Leverage, Komisaris independent, Manajemen laba V. Dependen: Agresifitas pajak	39 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2006- 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris independent berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak • Leverage dan manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak • Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak 	2012
3	(Rusydi, 2013)	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia	V. Independen: Ukuran perusahaan V. Dependen: Penghindaran pajak	68 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap aggressive tax avoidance	2013
4	(Oktavia & Martani, 2013)	Tingkat Pengungkapan dan Penggunaan Derivatif Keuangan dalam Aktivitas Penghindaran Pajak	V. Independen: Tingkat pengungkapan dan penggunaan derivatif keuangan V. Dependen: Penghindaran pajak	152 jumlah observasi sampel dari perusahaan industry nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan derivative keuangan berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak • Penggunaan derivative berpengaruh positif terhadap agresivitas keuangan 	2013
5	(Maharani & Suardana, 2014)	Pengaruh Corporate Governance Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur	V. Independen: Kepemilikan institusional, Porsi dewan komisaris independent, Kualitas audit, Komite audit ROA, Risiko perusahaan V. Dependen: Penghindaran pajak	37 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008- 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance • Proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan ROA berpengaruh negative terhadap tax avoidance 	2014
6	(Carolina dkk., 2014)	Karakteristik Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Dengan Leverage sebagai Variabel Intervening	V. Independen: Karakter eksekutif V. Intervening: Leverage V. Dependen: Penghindaran Pajak	20 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012	Karakter eksekutif berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak dengan dimediasi oleh leverage.	2014
7	(Sandy & Lukviarman, 2015)	Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur	V. Independen: GCG Kepemilikan institusional, Kepemilikan komisaris independent, Kualitas audit, Komite audit V. Dependen: Penghindaran pajak	50 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011- 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi komisaris independent, kualitas audit, dan komite audit berpengaruh negative terhadap penghidaran pajak • Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 	2015
8	(Saputra, Rifa, & Rahmawati, 2015)	Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance	V. Independen: Proporsi dewan komisaris independent, Kualitas audit, Komite audit, Profitabilitas, Return on asset, Karakter eksekutif V. Dependen: Penghindaran pajak	38 perusahaan property, real estate, dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012- 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Return on Assets dan karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance • Proporsi dewan, kualitas audit, audit komite tidak signifikan mempengaruhi tax avoidance 	2015

No	Peneliti	Judul	Variabel	Populasi & Sampel	Hasil	
9	(Merslythalia & Lasmana, 2016)	Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance	V. Independen: Kompetensi eksekutif Ukuran perusahaan, Komisaris independent, Kepemilikan institusional V. Dependen: Penghindaran pajak	49 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance • Kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, dan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 	2016
10	(Maraya & Yendrawati, 2016)	Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Tambang dan CPO	V. Independen: Corporate governance, Corporate social responsibility V. Dependen: Penghindaran pajak	13 perusahaan tambang dan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010- 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak • Pengungkapan tanggungjawab social berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 	2016
11	(Palil, Malek, & Jaguli, 2016)	Issues, Challenges and Problems with Tax Evasion: The Institutional Factors Approach	V. Independen: Probabilitas terdeteksi, Peran otoritas pajak, Kompleksitas system pajak V. Dependen: Penghindaran pajak	5500 mail surveys yang didistribusikan ke wajib pajak individu di Malaysia. Serta 23 pengajar dan professional di berbagai sector dan anggota dari masyarakat umum (bukan spesialis pajak)	<ul style="list-style-type: none"> • Kompleksitas system dan probabilitas dapat terdeteksi berdampak signifikan pada penggelapan pajak • Peran otoritas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak 	2016
12	(Dharma & Ardiana, 2016)	Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politi terhadap Tax Avoidance	Variabel Independen: Leverage, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik Variabel Dependen: Tax avoidance	144 perusahaan manufaktur di BEI periode 2012-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Leverage dan intensitas asset tetap berpengaruh negative terhadap tax avoidance • Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance • Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan tax avoidance 	2016
13	(Mahaputra, Rustiarini, Anggraini, & Sudiartana, 2018)	National Culture and Perceived Ethics of Tax Evasion: Case of Bali Province	V. Independen: Budaya nasional, Persepsi etis wajib pajak V. Dependen: Penggelapan pajak	377 wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian individualistic/collectivistic, maskulin/feminism berkaitan dengan persepsi etis atas penggelapan pajak • Orientasi jangka panjang/pendek dan kesenangan/pengekangan tidak berkaitan dengan persepsi etis atas penggelapan pajak 	2018

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa variabel-variabel independent yang mempengaruhi penghindaran pajak atau perilaku agresivitas pajak. Terdapat 13 penelitian atau artikel yang membahas tentang penghindaran pajak. Mayoritas peneliti-peneliti sebelumnya melakukan pengujian

menggunakan variabel-variabel yang berkaitan dengan corporate governance, struktur kepemilikan, dan kinerja keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dari beberapa variabel tersebut terdapat penelitian yang mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Berikut ini dijabarkan beberapa hasil temuan penelitian sebelumnya.

Risiko perusahaan

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut. Pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakter yaitu, risk taker dan risk averse. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter risk taker dan risk averse tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada (Maharani & Suardana, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) diperoleh hasil bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat risiko yang dimiliki oleh perusahaan maka akan cenderung untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak.

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (Sandy & Lukviarman, 2015). Terdapat beberapa penelitian yang telah menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen ini terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Maharani dan Suardana (2014), Sandy dan Lukviarman (2015), dan Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Merslythalia dan Lasmana (2016) dan Saputra dkk. (2015) tidak menemukan adanya pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Saputra dkk., 2015).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) mendapatkan hasil bahwa kualitas audit yang baik akan membuat tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan menjadi berkurang. Hal tersebut juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Namun, Saputra dkk. (2015) dalam penelitiannya tidak dapat mendeteksi pengaruh kualitas audit terhadap aktivitas penghindaran pajak di perusahaan.

Komite Audit

Komite audit merupakan sekumpulan orang yang dipilih dari anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan (disclosure). Komite audit memiliki peran penting sebagai salah satu organ perusahaan yang mutlak harus ada dalam penerapan corporate governance (Saputra dkk., 2015). Dari penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) dan Maharani dan Suardana (2014) disimpulkan bahwa komite audit signifikan berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan kedua peneliti tersebut, Saputra dkk. (2015) tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara komite audit terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional

Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen. Seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri (Merslythalia & Lasmana, 2016). Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati (2016) dihasilkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Namun, Sandy dan Lukviarman (2015) tidak dapat membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Peneliti melihat adanya celah untuk mengembangkan penelitian tentang tax avoidance ini di kemudian hari. Mengingat bahwa dari hasil literature review yang dilakukan terhadap 17 jurnal bidang ekonomi yang terindeks di Sinta hanya terdapat 13 penelitian atau artikel yang membahas terkait factor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Oleh karena itu, peneliti juga mendapat gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2010) yang menyatakan bahwa ada kemungkinan perusahaan-perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing atau transaksi pihak berelasi. Kemudian dari kasus yang mengungkap adanya beberapa nama-nama politisi yang termasuk dalam list Panama Papers membuat kecurigaan akan terjadinya penghindaran pajak pada perusahaan yang terkoneksi dengan pihak politisi.

Di Indonesia kedekatan antara pelaku bisnis dengan pemerintah cukup tinggi, dimana terdapat fenomena payung politik dimana para pebisnis sengaja membina koneksi politik untuk ‘memayungi’ atau mengamankan dan memudahkan akses bisnis mereka termasuk dalam kepentingan perpajakan perusahaan (Hidayati & Diyanty, 2018). Kim dan Zhang (2016) menyebutkan bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan dapat melindungi perusahaan dari risiko deteksi tindakan pajak agresif. Adanya keuntungan dari memiliki koneksi politik ini akan meminimalkan biaya yang muncul dari melakukan kegiatan agresivitas pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik lebih cenderung melakukan agresivitas pajak, yang artinya koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan (Kim & Zhang, 2016; Wahab, dkk., 2017; Hidayati & Diyanty, 2018; Lin, dkk., 2017; Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Dharma & Ardiana (2016) menyatakan tidak ada pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Sementara, Pranoto & Widagdo (2015) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Kepemilikan asing atau perusahaan-perusahaan yang terkait dengan asing diinginkan bagi kebanyakan negara berkembang untuk mencari dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat karena kinerja yang unggul, produktivitas yang tinggi, nilai saham yang kuat, dan pengungkapan sukarela yang tinggi. Arus masuk investasi asing ke negara-negara berkembang telah menjadi penyebab keprihatinan karena adanya kesempatan untuk melakukan tindakan *profit shifting* di berbagai cabang perusahaan multinasional pada negara tuan rumah. *Profit shifting* merupakan pemindahan laba dari wilayah dengan tingkat pajak yang tinggi ke tingkat wilayah dengan pajak yang rendah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salihu, dkk. (2015), Ferdiawan dan Firmansyah (2017), dan Idzni dan Purwanto (2017) menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap perilaku agresivitas pajak perusahaan. Namun penelitian mereka bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andikaningprang, dkk. (2017), Rusydi dan Martani (2014), dan Purnomo (2016) yang dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Praktik penghindaran atau agresivitas pajak juga dapat terjadi pada perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan transaksi hubungan istimewa (Zubaidah & Satyawan, 2017). Sejalan dengan hal tersebut, Santoso (2004) menyatakan bahwa dari perspektif pemerintah,

penyebab pemerintah kehilangan potensi dalam memungut pajak adalah penentuan harga atas transaksi hubungan istimewa (*transfer pricing*). Mayoritas perusahaan yang memiliki hubungan istimewa terutama perusahaan multinasional akan mengalihkan keuntungannya dari negara-negara yang memungut pajak dengan tarif yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang memungut pajak dengan tarif yang lebih rendah (*low tax countries*).

Park (2018) dan Zubaidah dan Satyawati (2017) dalam penelitian terdahulu mereka menyatakan bahwa praktik *related party transactions* berpengaruh positif terhadap perilaku agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan, Panjulusman, dkk. (2018) mendapatkan kesimpulan yang berbeda yaitu *related party transactions* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti bertujuan untuk menguji hubungan antara koneksi politik, *foreign investor's interest*, *related party transactions*, dan penghindaran pajak. Kemudian peneliti juga akan menguji pengaruh moderasi *corporate governance* pada hubungan antara koneksi politik dan *foreign investor's interest* terhadap penghindaran pajak melalui *related party transactions*.

DAFTAR REFERENSI

- Andikaningprang, A., Pratomo, D., & Kurnia. (2017). Pengaruh foreign investors' interests dengan variabel kontrol profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance. *E-Proceeding of Management*, 4(2), 1521–1526.
- Carolina, V., Natalia, M., & Debbianita. (2014). Karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance dengan leverage sebagai variabel intervening. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 18(3), 409–419.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh leverage, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh political connection, foreign activity, dan real earnings management terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624.
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22(1), 46–60.
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh ketertarikan investor asing dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–12.
- Kim, C. (Francis), & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114.
- Lin, K. Z., Mills, L. F., Hang, F., & Li, Y. (2017). Do political connections weaken tax enforcement effectiveness?. *Contemporary Accounting Research*, 12(10), 3218–3221.
- Mahaputra, I. N. K. A., Rustiarini, N. W., Anggraini, N. P. N., & Sudiartana, I. M. (2018). National culture and perceived ethics of tax evasion: case of Bali province. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 21(1), 89–104.
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 525–539.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan cpo. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159.

- Merslythalia, D. R., & Lasmana, M. S. (2016). Pengaruh kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 117–124.
- Oktavia, O., & Martani, D. (2013). Tingkat pengungkapan dan penggunaan derivatif keuangan dalam aktivitas penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 129–146.
- Palil, M. R., Malek, M. M., & Jaguli, A. R. (2016). Issues, challenges and problems with tax evasion: the institutional factors approach. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18(2), 187–206.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 105–114.
- Park, S. (2018). Related party transactions and tax avoidance of business groups. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10).
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2015). Pengaruh koneksi politik dan corporate governance terhadap tax aggressiveness. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 7(1), 472–486.
- Purnomo, L. C. (2016). Pengaruh struktur kepemilikan perusahaan terhadap tindakan pajak agresif. *Jurnal BPPK*, 9(1), 99–108.
- Rahayu, N. (2010). Evaluasi regulasi atas praktik penghindaran pajak penanaman modal asing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 61–78.
- Rusydi, M. K. (2013). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap aggressive tax avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 165–329.
- Rusydi, M. K., & Martani, D. (2014). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap aggressive tax avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi 17*, 1(1), 1–19.
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., Normala, S., & Obid, S. (2015). Foreign investors' interests and corporate tax avoidance: evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11(2), 138–147.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98.
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 1–12.
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, leverage, komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167–177.
- Wahab, E. A. A., Arif, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z.-M. (2017). Political Connections, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424-451.
- Zubaidah, L., & Satyawan, M. D. (2017). Pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 6(1), 1–22.